



DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MAJENE



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini dengan lancar.

Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Majene.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di tahun – tahun mendatang. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 30 Mei 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Majene



MUKHLIS, SKM. M.Kes

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19641004 198703 1 022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	8
2.4. Review terhadap prioritas daerah dalam rancangan awal RKPD	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	13
3.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	20
BAB V PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Majene tahun 2024 disusun dengan Membedakan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat serta mempertimbangan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024. Renja PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majene sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja PD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra PD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Dinas Perhubungan Kabupaten Majene sebagai salah satu dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Majene dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, merupakan implementasi dari

berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipologi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Majene membidangi urusan wajib, yakni urusan Perhubungan. Urusan ini sangat menunjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Majene.

Pengembangan sistem transportasi diarahkan kepada peningkatan aksesibilitas antara daerah dengan wilayah-wilayah hinterlandnya, terutama dengan pusat kegiatan lokalnya, yang pada umumnya adalah ibu kota kecamatan.

Pengembangan sistem transportasi yang mendukung sistem perkotaan Majene terutama adalah transportasi darat melalui sistem jaringan jalan, maupun arteri sekunder. Peningkatan aksesibilitas berarti memperpendek jarak tempuh dan waktu tempuh, sehingga aliran orang dan barang lebih mengalir ke pusat pertumbuhan wilayah sendiri, ketimbang ke pusat wilayah lain. Selain itu, juga direncanakan penumbuhan dan pengembangan kereta api yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dari Majene ke daerah lain, terutama angkutan barang hasil - hasil komoditi.

Rencana kerja perangkat daerah atau disebut juga dengan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan tahunan tingkat PD. Penyusunan renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Majene memajukan dan membangun bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan sebagai salah satu PD juga memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan tingkat PD, yang terdiri dari Renstra PD untuk

periode 5 (lima) tahun dan Renja PD untuk perencanaan tahunan. Dalam hal ini dokumen yang disusun Dinas Perhubungan adalah Rencana Kerja Dinas Perhubungan atau disebut dengan Renja Dinas Perhubungan tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa Peraturan dan ketentuan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 44);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Majene tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Majene tahun 2024 ini antara lain adalah:

1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majene.
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di tahun 2024 serta dana yang dibutuhkan.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Majene tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja PD ini, adalah dengan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen, yang meliputi ;

- 1. Kata Pengantar**
- 2. Daftar Isi**
- 3. Daftar Tabel**
- 4. Bab-Bab yang terdiri dari :**

A. BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

B. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

C. BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

D. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

E. BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Majene 2021 - 2026

Dinas Perhubungan Kabupaten Majene melaksanakan Bidang Urusan Perhubungan. Bidang Urusan Perhubungan di Dinas Perhubungan Pada Tahun 2022 dilaksanakan dalam 3 Program, sub kegiatan 39 dan 11 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.433.902.198,17. Ditahun 2021 Dinas Perhubungan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan 2021-2026. Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Dari target Kinerja di tahun 2021 maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra PD Dinas Perhubungan Tahun 2021 Kabupaten Majene yang tercantum dalam tabel 1(terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishub Tahun 2021 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Majene disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dishub 2016-2021 dan Renja Tahunan Dishub. Dapat dilihat pada tabel 2. (terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Majene dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah. Belum terwujudnya sistem pusat simpul transportasi (terminal) yang mengikuti rencana struktur ruang wilayah masih menjadi kendala dalam menata trayek angkutan yang menghubungkan antar wilayah.
2. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima di bidang perhubungan.

2.4 Review terhadap Prioritas Daerah dalam Rancangan Awal RKPD

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja PD Dinas Perhubungan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2023 terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Dapat dilihat pada tabel 3 (terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung maupun secara tertulis.

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Rapat Kerja dengan Pemangku Kepentingan di OPD masing-masing, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, OPD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan Masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan tetapi ada juga sebagian lagi yang mengusulkan kegiatan pada OPD Dinas teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha.

Dinas Perhubungan menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan Tupoksi Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan, dapat dilihat pada **Tabel.4.** terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah Visi “**Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah**” dengan misi:

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

Kementerian Perhubungan diharapkan akan mendorong Indonesia menjadi negara Indonesia unggul di tahun 2024 dengan ekspektasi sebagai berikut.

1. Meningkatkan pertumbuhan produktifitas nasional yang mendukung pertumbuhan nasional dengan 6 persen.
2. Penurunan biaya logistik yang berdampak pada peningkatan industri manufaktur dengan angka 7 persen.
3. Pengembangan 5 destinasi pariwisata baru kelas dunia untuk mendukung devisa sektor pariwisata sehingga tercapai suatu penerimaan (pemasukan negara) yang luar biasa.

4. Kinerja layanan perhubungan mencapai indeks kepuasan layanan dengan semua

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan **“Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan NilaiTambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:**

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan WakilPresiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana

industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahkan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 - 2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Dinas perhubungan mendukung tujuan Pembangunan sektor perhubungan sebagai perwujudan visi dan misi kementerian perhubungan, dimana sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan yaitu Meningkatnya Infrastruktur bidang perhubungan yang berkualitas dan Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran pembangunan

daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pelayanan Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2021 – 2026, yaitu :

4.1.1 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan;
3. Mewujudkan sumber daya aparatur yang Unggul Mandiri dan Religius.

4.1.2 Sasaran

Dengan adanya tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas layanan transportasi yang mampu menjangkau masyarakat;
2. Meningkatnya keselamatan transportasi dengan infrastruktur bidang perhubungan yang berkualitas.
3. Membaiknya kualitas sumber daya aparatur perhubungan.

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Tabel
Matriks Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas layanan transportasi yang mampu menjangkau masyarakat	Persentase Konektivitas transportasi publik	76	78	81	85	88
2	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	Meningkatnya keselamatan transportasi dengan Infrastruktur bidang perhubungan yang berkualitas	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	3,1	2,8	2,5	2,2	2,0
			Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana perhubungan	86	87	88	89	90
3	Mewujudkan sumber daya aparatur yang Unggul Mandiri dan Religius	Membaiknya kualitas sumber daya aparatur perhubungan	Skor evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80	82	85	87	90

Program dan Kegiatan

Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 3 program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

- c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- e. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
- c. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

- d. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- e. Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pada umumnya semua program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene untuk tahun 2024 tidak mengalami kendala atau masalah apapun, selama kegiatan yang ada tersebut tetap didukung dengan dana yang mencukupi, karena semua rencana kegiatan tersebut telah diukur dan diperhitungkan atas dasar kegiatan tahun yang lalu.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut, ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dan Pemerintah Pusat
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Majene Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk Tahun 2024 rencana program yang akan dilaksanakan ada 3 (tiga) program dengan 16 (Enam Belas) kegiatan. Lokasi kegiatan tersebar ke 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Majene. Rencana anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.4.838.573.342,34 (Empat miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua koma Tiga Puluh Empat Rupiah) yang berasal dari APBD

Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) di tahun ke 3 Dinas Perhubungan telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan Kepermendagri 050-5889 tahun 2021, Secara rinci Rencana program dan kegiatan tersebut adalah : Berikut Tabel 5 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Majene telah menyusun Rencana Kerja (Renja), yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program bagi segenap stake holders yang terkait.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene.

Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majene Tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka – angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Danantisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Majene dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Majene secara konsisten dan bertanggung jawab.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus diantaranya :

1. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas kedinasan dengan cepat dan akurat.
2. Meningkatkan sarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, handal dan lancar.
3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan umum.

4. Meningkatkan sarana pelayanan terminal dan perparkiran untuk menunjang kelancaran transportasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pendukung dalam pembangunan di Wilayah Kabupaten Majene khususnya di Bidang Perhubungan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana perhubungan (transportasi).

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 30 Mei 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAJENE**



MUKHLIS, SKM. M.Kes
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 196410041987031022

L A M P I R A N

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022
Kabupaten Majene

ma PD : Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					DINAS PERHUBUNGAN									
					Non Urusan									
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah								
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah								
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	6	6	6	100%	6	18	60%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah								
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	38	38	38	100%	38	38	100%
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik								
2	15	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diamankan	5	0	1	1	100%	0	1	20%
2	15	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	5	0	1	0	0%	0	0	0%
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai lengkap administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah								
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	2	0	0	#DIV/0!	0	2	20%
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	0	2	2	100%	2	4	40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250	100	100	100	100%	0	200	80%
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah								
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	0	5	5	100%	0	5	20%
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	6	6	6	100%	6	18	60%
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432	36	36	36	100%	36	108	25%
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik								
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15	3	0	0	#DIV/0!	0	3	20%
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3	3	100%
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	204	204	204	204	100%	204	204	100%
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas atau jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan								
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	23	23	23	23	100%	23	23	100%
2	15	01	2.09	07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	30	30	30	100%	30	30	100%
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15	15	15	15	100%	15	15	100%
2	15	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13	13	13	13	100%	13	13	100%
2					Urusan Pemerintahan									
2	15				Bidang Perhubungan									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan								
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	6	0	1	1	100%	0	1	17%
2	15	02	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	2	0	0	0	#DIV/0!	1	1	50%
2	15	02	01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	2	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	15	02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik								
2	15	02	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang	13	2	2	2	100%	3	7	54%
2	15	02	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang direhab dan dipelihara	5	5	5	5	100%	5	5	100%
2	15	02	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal								
2	15	02	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasana Terminal yang dikembangkan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
2	15	02	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang di Rehab	2	1	1	1	100%	0	2	100%
2	15	02	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Terminal	2	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	15	02	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Peningkatan Pengelolaan Parkir								
2	15	02	04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Peningkatan Pelayanan Parkir	3	1	0	0	#DIV/0!	0	1	33%
2	15	02	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat upaya Kelaikan Keselamatan Kendaraan								
2	15	02	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	15	02	05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Koordinasi dalam Penyelenggaraan PKB	24	5	2	2	100%	5	12	50%
2	15	02	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					#DIV/0!		0	#DIV/0!
2	15	02	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		2	1	0	0	#DIV/0!	0	1	50%
2	15	02	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50	10	10	10	100%	10	30	60%
2	15	02	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Forum LLAJ	5	1	1	0	0%	0	1	20%
2	15	02	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan dan Barang antar kota dalam daerah								
2	15	02	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	1	1	1	100%	1	3	50%
2	15	02	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	15	02	11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan rencana umum jaringan Trayek Perkotaan dalam daerah								
2	15	02	11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	0	1	1	100%	0	1	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN									
2	15	03	01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian pengelolaan Izin Usaha Angkutan laut bagi badan usaha								
2	15	03	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota		60	12	0	0	#DIV/0!	0	12	20%
2	15	03	08		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase capaian penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal								
2	15	03	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Pelaku Usaha yang mempunyai Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	60	12	0	0	#DIV/0!	0	12	20%
2	15	03	17		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase capaian penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan					#DIV/0!		0	#DIV/0!
2	15	03	17	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan koordinasi	60	12	0	0	#DIV/0!	0	12	20%
2	15	03	18		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase capaian penerbitan Izin Reklamasi								
2	15	03	18	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan koordinasi	60	12	0	0	#DIV/0!	0	12	20%

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Majene

[illegible]

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Majene

OPD : Dinas Perhubungan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.951.302.921	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.316.773.342	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	70.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	35.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Majene	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Majene	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Majene	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Majene	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Majene	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Majene	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Majene	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Majene	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Majene	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Majene	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Majene	Jumlah dokumen LKIP dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Majene	Jumlah dokumen LKIP dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 laporan	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Majene	Jumlah dokumen SAKIP	6 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Majene	Jumlah dokumen SAKIP	6 laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.963.302.921	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.741.773.342	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Majene	Jumlah ASN yang disediakan administrasi Gaji dan Tunjangan	40 orang	3.424.102.921	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Majene	Jumlah ASN yang disediakan administrasi Gaji dan Tunjangan	40 orang	3.425.373.342	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Majene	Jumlah OB tenaga administrasi yang dibayarkan	1512 orang	529.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Majene	Jumlah OB tenaga administrasi yang dibayarkan	1512 orang	311.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Majene	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Majene	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik	100 %	24.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik	100 %	5.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Majene	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	2 dokumen	7.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Majene	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	2 dokumen	5.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Majene	Jumlah BMD yang diamankan	100 item	7.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Majene	Jumlah BMD yang diamankan	100 item	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Majene	Jumlah laporan rekonsiliasi BMD yang disusun	3 laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Majene	Jumlah laporan rekonsiliasi BMD yang disusun	3 laporan	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Majene	Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun	5 laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Majene	Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun	5 laporan	-	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan	100 %	15.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan	100 %	5.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Majene	Jumlah objek retribusi daerah yang terdata dan terdaftar	50 objek	5.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Majene	Jumlah objek retribusi daerah yang terdata dan terdaftar	50 objek	-	
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Majene	Jumlah laporan pemungutan retribusi daerah	252 laporan	5.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Majene	Jumlah laporan pemungutan retribusi daerah	252 laporan	-	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Majene	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12 laporan	5.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Majene	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12 laporan	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai lengkap administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	178.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai lengkap administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	105.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Majene	Jumlah set pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	2 paket	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Majene	Jumlah set pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	2 paket	25.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Majene	Jumlah ASN yang diasistensi kelengkapan administrasi kepegawaian	40 orang	8.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Majene	Jumlah ASN yang diasistensi kelengkapan administrasi kepegawaian	40 orang	5.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Majene	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsinya	4 orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Majene	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsinya	4 orang	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Majene	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasi kan	2 peraturan	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Majene	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasi kan	2 peraturan	50.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Majene	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diberikan bimtek implementasi	2 peraturan	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Majene	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diberikan bimtek implementasi	2 peraturan	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	199.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	185.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 unit	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 unit	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah dokumen yang digandakan	10000 dokumen	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah dokumen yang digandakan	10000 dokumen	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 jenis	7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 jenis	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kegiatan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kegiatan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	36 kegiatan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	36 kegiatan	120.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik	100 %	220.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik	100 %	60.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	50.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	10 unit	50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan	10 unit	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	145.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	93.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat keluar	200 surat	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat keluar	200 surat	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	3 rekening	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	3 rekening	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 kali	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 kali	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	204 OB	70.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	204 OB	78.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kendaraan dinas atau jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	100 %	137.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kendaraan dinas atau jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	100 %	87.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	23 unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	23 unit	60.000.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		7.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		7.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	5.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		355.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		471.800.000	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten		50.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten		-	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik		105.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik		225.000.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang	3 unit	75.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang	16 unit	215.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara	5 unit	30.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara	4 unit	10.000.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal		50.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal		31.800.000	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1 paket	30.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1 paket	31.800.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	20.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	-	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Tingkat upaya Kelaikan Keselamatan Kendaraan		75.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Tingkat upaya Kelaikan Keselamatan Kendaraan		10.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 unit	50.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 unit	-	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 orang	15.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 orang	-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 laporan	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 laporan	10.000.000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		25.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		45.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10 laporan	15.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10 laporan	35.000.000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Forum LLAJ	1 laporan	10.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Forum LLAJ	1 laporan	10.000.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan dan Barang antar kota dalam daerah		40.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan dan Barang antar kota dalam daerah		160.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	35.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	135.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	5.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	25.000.000	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan rencana umum jaringan Trayek Perkotaan dalam daerah		10.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan rencana umum jaringan Trayek Perkotaan dalam daerah		-	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Cakupan Pelayanan Pengelolaan Pelayaran		60.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Cakupan Pelayanan Pengelolaan Pelayaran		50.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase capaian pengelolaan Izin Usaha Angkutan laut bagi badan usaha	70 %	10.000.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase capaian pengelolaan Izin Usaha Angkutan laut bagi badan usaha	70 %	10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan pengawasan pengangkutan barang lintas laut	2 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan pengawasan pengangkutan barang lintas laut	2 laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Mengendalikan mobilitas penyeberangan penduduk dan keselamatan n pelayaran		10.000.000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Mengendalikan mobilitas penyeberangan penduduk dan keselamatan n pelayaran		-	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lapaoran pemeriksaa n kapal yang Yang Layak beroperasi	4 laporan	10.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lapaoran pemeriksaa n kapal yang Yang Layak beroperasi	4 lapora	-	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		Persentase capaian penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal		10.000.000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		Persentase capaian penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal		10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		Jumlah laporan Pelaku Usaha yang mempunyai Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	4 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		Jumlah laporan Pelaku Usaha yang mempunyai Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	4 lapora	10.000.000	
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal		10.000.000	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal		10.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Laporan Pengedalian pelaksanaan Rencana Induk DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 laporan	10.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Laporan Pengedalian pelaksanaan Rencana Induk DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 lapora	10.000.000	
	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase capaian penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan		10.000.000	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase capaian penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan		10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	4 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	4 lapora	10.000.000	
	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase capaian penerbitan Izin Reklamasi		10.000.000	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase capaian penerbitan Izin Reklamasi		10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	4 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	4 lapora	10.000.000	
	TOTAL				5.366.302.921				TOTAL	#####	

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Majene

OPD : Dinas Perhubungan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Majene	Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik		
	- Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)/ 8 Unit	Kec. Tubo Tengah	Jumlah PJU yang terpasang	Rp. 100.000.000,00	
	- Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)/ 8 Unit	Kec. Pamboang dan kec. Sendana	Jumlah PJU yang terpasang	Rp. 100.000.000,00	
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Majene	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan dan Barang antar kota dalam daerah		
	- Pengadaan Mobil Pick Up (1 Unit)	Desa Bonde, Kec. Pamboang Majene	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Rp. 185.000.000,00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan lainnya
	- Pengadaan Mobil Pick Up (1 Unit)		Jumlah Kendaraan yang diadakan	Rp. 185.000.000,00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan lainnya

Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Majene

Nama OPD : Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DINAS PERHUBUNGAN				4.838.573.342				5.943.059.170
					Non Urusan				4.266.773.342				5.456.059.170
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Majene	100%	4.266.773.342			100%	5.456.059.170
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 %	35.000.000			100 %	70.000.000
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	Majene	2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	10.000.000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Majene	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	10.000.000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Majene	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	10.000.000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA	Majene	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	10.000.000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	Majene	1 dokumen	5.000.000			1 dokumen	10.000.000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Majene	2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	10.000.000
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP	Majene	6 dokumen	5.000.000			6 dokumen	10.000.000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan Perangkat Daerah		100 %	3.741.773.342			100 %	4.041.659.170
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi Gaji dan Tunjangan	Majene	40 orang	3.425.373.342			40 orang	3.502.459.170
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah OB tenaga administrasi yang dibayarkan	Majene	1512 orang	311.400.000			1512 orang	529.200.000
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang disusun	Majene	2 laporan	-			2 laporan	-
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Majene	1 laporan	5.000.000			1 laporan	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik		100 %	5.000.000			100 %	24.000.000
2	15	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	Majene	2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	7.000.000
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diamankan	Majene	100 item	-			100 item	7.000.000
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi BMD yang disusun	Majene	3 laporan	-			3 laporan	5.000.000
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD yang disusun	Majene	5 laporan	-			5 laporan	5.000.000
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah		100 %	5.000.000			100 %	15.000.000
2	15	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi daerah yang terdata dan terdaftar	Majene	1 dokumen	-			1 dokumen	5.000.000
2	15	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan pemungutan retribusi daerah	Majene	12 laporan	-			12 laporan	5.000.000
2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Majene	12 laporan	5.000.000			12 laporan	5.000.000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai lengkap administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah		100 %	55.000.000			100 %	196.000.000
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	Majene	1 Paket	25.000.000			2 Paket	40.000.000
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang diasistensi kelengkapan administrasi kepegawaian	Majene	2 dokumen	5.000.000			2 dokumen	8.000.000
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Majene	4 orang	25.000.000			4 orang	40.000.000
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Majene	50 orang				50 orang	50.000.000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 %	185.000.000			100 %	237.400.000
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Majene	10 unit	5.000.000			10 unit	7.000.000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Majene	6 unit	15.000.000			6 unit	25.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang diqandakan	Majene	10000 dokumen	15.000.000			10000 dokumen	15.000.000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Majene	5 dokumen	5.000.000			5 unit	7.000.000
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Majene	12 kegiatan	25.000.000			12 kegiatan	25.000.000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Majene	36 kegiatan	120.000.000			36 kegiatan	150.000.000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik		100 %	60.000.000			100 %	590.000.000
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Majene					1 unit	400.000.000
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Majene	1 unit	50.000.000			5 unit	150.000.000
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Majene	1 unit	10.000.000			8 unit	25.000.000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		100 %	93.000.000			100 %	145.000.000
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Majene	3 rekening	15.000.000			3 rekening	70.000.000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah OB jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Majene	204 OB	78.000.000			204 OB	70.000.000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas atau jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan		100 %	87.000.000			100 %	137.000.000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Majene	23 unit	60.000.000			23 unit	90.000.000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Majene	70 unit	-			70 unit	7.000.000
2	15	01	2.09	07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Majene	30 unit	7.000.000			30 unit	10.000.000
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Majene	1 unit	10.000.000			1 unit	15.000.000

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	02	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal		100 %	21.800.000			100 %	50.000.000
2	15	02	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dikembangkan	Majene	2 lokasi	21.800.000			2 lokasi	30.000.000
2	15	02	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang di Rehab	Majene	2 lokasi				2 lokasi	20.000.000
2	15	02	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Terminal		2 orang	-			2 orang	-
2	15	02	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat upaya Kelaikan Keselamatan Kendaraan		100 %	10.000.000			100 %	25.000.000
2	15	02	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Majene	2 orang	-			2 orang	15.000.000
2	15	02	05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Koordinasi dalam Penyelenggaraan PKB	Majene	2 laporan	10.000.000			2 laporan	10.000.000
2	15	02	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		100 %	45.000.000			100 %	25.000.000
2	15	02	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah sub kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		10 kegiatan				10 kegiatan	15.000.000
					- Posko lebaran dan tahun baru	Frekuensi pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Majene	3 kali/ tahun	15.000.000			3 kali/ tahun	-
					- Pengawasan dan pengendalian LLAJ	Frekuensi Pengawasan dan pengendalian LLAJ	Majene	24 kali/ tahun	20.000.000			24 kali/ tahun	-
2	15	02	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Forum LLAJ	Majene	1 laporan	10.000.000			1 laporan	10.000.000
2	15	02	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan dan Barang antar kota dalam daerah		100 %	220.000.000			100 %	40.000.000
2	15	02	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luar Majene, Majene	5 unit				5 unit	40.000.000
					- Pengadaan Mobil Pickup	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Majene	1 Unit	185.000.000				
					- Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan darat	Persentase monitoring dan pengendalian pelayanan angkutan darat	Luar Majene, Majene	100 %	15.000.000			100 %	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					- Pengawalan dan Penjemputan Jemaah Haji	Jumlah kegiatan pengawalan dan penjemputan	Luar Majene, Majene	2 keg	20.000.000			2 keg	-
2	15	02	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		4 laporan				4 laporan	-
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					50.000.000			
2	15	03	01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian pengelolaan Izin Usaha Angkutan laut bagi badan usaha		70 %	10.000.000			70 %	10.000.000
2	15	03	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota								
					- koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan laut	Persentase monitoring dan pengendalian pelayanan angkutan laut	Luar Majene, Majene	100 %	7.000.000			100 %	7.000.000
					- Pengawasan Pengangkutan Barang Berbahaya Lintas Laut	Laporan pengawasan pengangkutan barang lintas laut	Majene	2 lap	3.000.000			2 lap	3.000.000
2	15	03	07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mengendalikan mobilitas penyeberangan penduduk dan keselamatan		70 %	10.000.000			70 %	10.000.000
2	15	03	07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
					- Pengawasan dan sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah peserta sosialisasi keselamatan pelayaran	Majene	50 peserta	10.000.000			50 peserta	10.000.000
2	15	03	08		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase capaian penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan		70 %				70 %	
2	15	03	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Pelaku Usaha yang mempunyai Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	Majene	4 lap	10.000.000			4 lap	10.000.000
2	15	03	10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				10.000.000				10.000.000
2	15	03	10	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Majene	1 Dok	10.000.000			1 Dok	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 15 03 17	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Persentase capaian penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan		60 %	10.000.000			60 %	10.000.000
2 15 03 17 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Jumlah laporan koordinasi	Majene	4 lap	10.000.000			4 lap	10.000.000
2 15 03 18	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Persentase capaian penerbitan Izin Reklamasi		60 %	10.000.000			60 %	10.000.000
2 15 03 18 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Jumlah izin reklamasi		4 Lap				4 Lap	
2 15 03 18 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Jumlah laporan koordinasi		4 Lap	10.000.000			4 Lap	10.000.000

Catatan :

PRIORITAS

PEMANGKU KEPENTINGAN

Majene, 30 Mei 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAJENE



MUKHLIS, SKM. M.Kes

NIP. 19611004 198703 1 022